

PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

By Roy Abdul Huda, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, Anas Malik

PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

Roy Abdul Huda¹, Rintan Ade Puspita¹¹, Surlidiya Nur Hasanah³, Anas Malik⁴

¹ Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,

² Prodi ¹¹ onomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,

³ Prodi ¹¹ onomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,

⁴ Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,

Email : royhuda03@gmail.com

ABSTRACT :

Fiscal policy plays a crucial role in enhancing social welfare, particularly in developing countries like Indonesia. Through budgetary instruments such as government spending and taxation, fiscal policy promotes economic equity and strengthens sectors like health, education, and social protection. This study aims to analyze the role of fiscal policy in supporting social development in Indonesia, focusing on implementation challenges and its effectiveness. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis based on secondary data from government reports, academic journals, and official documents. Findings indicate that Indonesia's fiscal policy has positively impacted social welfare, primarily through budget allocation for social welfare programs. However, significant challenges remain, including limited fiscal space, inequitable budget distribution, and transparency issues. Key recommendations include improving budget management efficiency, undertaking tax reforms, and strengthening inter-agency coordination to ensure more effective and equitable policies. With better management, fiscal policy can serve as a powerful tool for fostering inclusive and sustainable development.

Keywords: *Fiscal Policy, Social Welfare, Developing Countries, Indonesia*

ABSTRAK :

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terutama di negara berkembang seperti Indonesia dengan melalui instrumen anggaran seperti belanja pemerintah dan perpajakan kebijakan fiskal dapat mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia dengan fokus pada tantangan implementasi dan efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder dari laporan pemerintah, jurnal akademik dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia telah memberikan dampak positif terutama melalui alokasi anggaran untuk program Kesejahteraan Sosial. Namun terdapat tantangan signifikan seperti keterbatasan ruang fiskal ketimpangan dalam distribusi anggaran dan masalah transportasi yang merekomendasikan untuk melakukan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, informasi perpajakan serta pembuatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan lebih efektif dan merata. Pengelolaan Yang lebih baik kebijakan fiskal dapat menjadi alat yang kuat dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : *Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Negara Berkembang, Indonesia*

PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam proses pembangunan di Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan salah satu instrumen

penting dalam mencapai tujuan ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup penggunaan anggaran negara yang dapat berupa penerimaan dan pengeluaran untuk mengatur perekonomian, pendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial yang mana berdasarkan konteks ini kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan atau kurang mampu.

Pentingnya kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk memitigasi dampak ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar dalam negara berkembang seperti Indonesia yang sering kali dihadapkan dengan masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatifnya. Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah redistribusi pendapatan yang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting adalah pajak dimana pemerintah Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pajak yang diterima oleh negara selanjutnya di alokasikan untuk program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat namun tantangan besar dalam implementasi kebijakan pajak adalah efisiensi pengumpulan pajak dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Selain Pajak kebijakan pengeluaran pemerintah termasuk subsidi, transfer sosial dan belanja publik lainnya juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan sosial yang mana pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pengelolaan anggaran yang buruk dapat menyebabkan pemborosan dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial.

Keberhasilan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang mana masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya kebijakan fiskal serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka dan Selain itu peran sektor swasta serta lembaga-lembaga internasional juga penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang inklusif.

Secara keseluruhan peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata kebijakan ini menjadi instrumen utama adalah upaya pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang melalui berbagai tantangan dalam menghadapi globalisasi serta perubahan domestik pemerintah Indonesia harus terus berinovasi dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Fiskal

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, pengguna tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Kebijakan fiskal dalam negara Indonesia tercermin dari APBN, dimana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal. Menurut J. Chelliah, tujuan kebijakan fiskal berikut harus diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni : 1. Tingkatkan hubungan antara tabungan dan pendapatan (y) terhadap konsumsi. 2. Tingkatkan investasi 3. Menggerakkan aliran beban atau biaya yang efisien 4. Minimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang signifikan (Azizah *et al.*, 2024).

2.2 Teori Kesejahteraan Sosial

Teori Kesejahteraan Sosial didasarkan pada prinsip keadilan secara distributif, solidaritas sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan dimana pandangan ini seringkali berbenturan dengan filosofi ekonomi neoliberal yang lebih mengutamakan pada pasar bebas. Model Kesejahteraan Sosial sering dikaitkan dengan pendekatan residual dan institusional. Pendekatan melihat kesejahteraan sebagai Respon yang sangat darurat sedangkan pendapatan institusional mengintegrasikan kesejahteraan dalam struktur sosial dan ekonomi negara.

2.3 Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Negara Berkembang

Kebijakan fiskal mengacu pada langkah-langkah pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan terutama melalui pajak demi mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Negara berkembang kebijakan fiskal sering digunakan untuk meminimalisir ketimpangan sosial mengacu pada investasi publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal termasuk pada kapasitas administratif yang terbatas, ruang

fiskal yang sempit dan ketergantungan tinggi pada utang luar negeri di mana faktor-faktor ini dapat menghambat efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan ekonomi dalam waktu jangka panjang.

Investasi dalam infrastruktur dan layanan sosial sering menjadi prioritas kebijakan fiskal di negara berkembang misalnya di Indonesia dalam alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dianggap sebagai strategi untuk memaksimalkan produktivitas dan daya tahan secara ekonomi. Kebijakan fiskal juga memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah yang terarah pada program sosial seperti subsidi dan bantuan langsung tunai dapat memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan hal ini relevan selama pandemi covid 19 ketika banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang mengandalkan kebijakan fiskal untuk melindungi masyarakat miskin.

2.4 Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui mekanisme pengeluaran publik yang terarah¹⁷ seperti subsidi dan program bantuan sosial yang mana menurut studi terbaru belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia yang merupakan indikator utama Kesejahteraan Sosial. Program subsidi yang dirancang dengan tepat sasaran dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di mana studi menunjukkan bahwa subsidi energi dan pangan yang diarahkan kepada kelompok rentan memiliki dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan meskipun memerlukan monitoring agar tidak terjadi penyimpangan.

Penerapan kebijakan pajak progresif memungkinkan redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah di mana pendapatan dari pajak ini sering sekali digunakan untuk menandai program kesejahteraan seperti jaminan kesehatan nasional, yang bertujuan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat. Kebijakan melalui peningkatan belanja modal dapat menciptakan lapangan kerja dan meminimalisir tingkat pengangguran serta memaksimalkan pendapatan rumah tangga yang mana Hal ini penting bagi negara berkembang seperti Indonesia di mana ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan utama²⁰

Dana transfer dari pusat ke daerah seperti dana alokasi umum dan dana desa yang berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di daerah terpencil. Studi menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Tertinggal. Pinjaman liar negeri sering digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur besar yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang namun peningkatan rasio utang terhadap PDB memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menghindari krisis fiskal (Munawar, 2019).

2.5 Instrumen Utama Kebijakan Fiskal

Subsidi energi dan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan merupakan instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat miskin yang mana bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan juga energi. Kebijakan fiskal Indonesia tahun 2024 menekankan pada pengelolaan utang yang sehat untuk menjaga keberlanjutan fiskal

dimana pemerintah mengupayakan penggunaan pembiayaan utang secara optimal untuk mengurangi tekanan pada APBN. Dana transfer ke daerah mendukung pemerataan pembangunan dan pemuatan kapasitas fiskal daerah. Alokasi ini mendorong pengelolaan fiskal yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sandryan *et al.*, 2024).

Melalui reformasi secara menyeluruh pemerintah fokus pada optimalisasi pendapatan negara serta pengendalian dan fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja negara untuk mendukung Prioritas pembangunan nasional. Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga stabilitas harga khususnya pada sektor pangan di mana langkah ini penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Belanja pemerintah diarahkan untuk investasi infrastruktur fisik dan modal manusia seperti pendidikan dan juga kesehatan yang Tujuannya adalah untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wulandari *et al.*, 2024).

2.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian

Teori ekonomi Keynesian, seperti yang dijelaskan oleh ekonom John Maynard Keynes, memiliki implikasi penting untuk memahami dinamika inflasi dan dampaknya pada ekonomi modern. Teori ini muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi tahun 1930-an, yang dijuluki sebagai Depresi Besar. Teori ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola ekonomi untuk mencapai stabilitas makroekonomi. Fokus utama teori Keynesian adalah inflasi, yang secara umum dipahami sebagai ukuran umum aktivitas ekonomi dan fluktuasi tingkat harga barang dan jasa.

Teori ekonomi Keynesian menyatakan bahwa inflasi diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk hidup di luar kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka meminta barang yang lebih efisien daripada yang tersedia, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan inflasi terjadi. Kebijakan keuangan yang umumnya dikenal adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengelola anggaran dan cadangan nasional. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan pendanaan yang signifikan untuk proyek-proyek infrastruktur, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan insentif kepada dunia usaha yang melakukan investasi. Selain itu, beberapa teori ekonomi telah mengkritik teori (Meirizal *et al.*, 2024)

2.7 Prinsip Pemerataan dalam Kebijakan Fiskal

Prinsip pemerataan dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat dalam pemerataan dilakukan melalui redistribusi pendapatan baik dengan pajak progresif maupun alokasi Belanja Negara yang mendukung kelompok rentan di mana pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong transformasi ekonomi inklusif dan meminimalisir disparitas antar wilayah terutama antara kawasan timur dan barat Indonesia. Pajak penghasilan yang bersifat progresif adalah salah satu instrumen utama dalam mendukung pemerataan di mana Selain itu transfer ke daerah dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal yang dapat membantu mengurangi kesenjangan regional. Berdasarkan APBN 2024 alokasi belanja diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di daerah yang tertinggal.

Alokasi belanja negara dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memiliki tujuan untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Contohnya pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan bahwa Penduduk daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan Misal yang berfokus pada pemerataan telah membantu Indonesia menurunkan rasio Dini dalam beberapa tahun terakhir menurut RAPBN 2024 target rasio gini adalah 0,374 sampai 0,377 yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mempersempit kesenjangan ekonomi.

2.8 Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk pengelolaan perekonomian negara (Atmaja Arifin Soeria, 2009). Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik (Aminah, 2024).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan: fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi tahun 1997/1998, dan krisis 2009 (Amtiran *et al.*, 2020).

2.9 Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Kemiskinan

Pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan terlihat dalam upaya redistribusi pendapatan. Redistribusi melalui pajak progresif dan pengeluaran sosial berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Pajak progresif Di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar dapat meningkatkan pendapatan negara yang selanjutnya digunakan untuk program-program yang mendorong kesejahteraan masyarakat miskin contohnya adalah pajak penghasilan yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat seperti bantuan langsung tunai dan subsidi untuk barang-barang pokok. Selain itu pengeluaran sosial menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mengurangi kemiskinan yang mana dialokasikan dalam anggaran negara untuk program-program bantuan sosial yang ditunjukkan langsung kepada kelompok miskin seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan subsidi Perumahan adalah langkah nyata dalam mencapai pemerataan. Misalnya

36 dana untuk program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai membantu 35 mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Salim 2021).

Namun dalam penggunaan kebijakan fiskal untuk pemerataan kemiskinan tantangan utama adalah ketimpangan antara daerah yang mana seringkali disebabkan oleh perbedaan kemampuan fiskal antar daerah di mana daerah dengan pendapatan lebih tinggi dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program sosial sementara daerah dengan pendapatan rendah kesulitan menyediakan anggaran yang memadai oleh karena itu kebijakan fiskal harus mencakup transfer dana antar daerah di mana daerah yang lebih kaya yang mentransfer sebagian pendapatannya ke daerah yang lebih miskin untuk 12 mendukung pemerataan.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi 32 bagian penting dari kebijakan fiskal dalam mengentaskan 13 kemiskinan yang mana program-program yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai program pelatihan kredit usaha rakyat dan bantuan untuk memperbaiki akses pasar bagi UMKM yang diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan penghasilannya dan keluar dari kemiskinan (Wibowo, 2022).

Kebijakan fiskal yang efektif untuk pemerataan kemiskinan juga membutuhkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan tanpa pengawasan yang ketat dana yang dialokasikan untuk program pengetahuan Kemiskinan dapat diterapkan atau tidak sampai kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu peran auditor negara dan lembaga pengawas sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dilontarkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Implementasi teknologi dalam sistem pengelolaan anggaran dapat membantu meningkatkan transparansi ini.

19 2.10 Tantangan Kebijakan Fiskal di Negara Berkembang

Tantangan kebijakan fiskal di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor struktural mulai dari ketergantungan pada sumber daya alam hingga keterbatasan kapasitas institusi dalam merancang dan menggunakan kebijakan fiskal yang efektif. Negara negara berkembang sering menghadapi batasan kapasitas 4 fiskal yang dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan negara yang rendah akibat tingginya ketergantungan pada sektor informal dan pajak yang tidak optimal menyebabkan banyak negara berkembang kesulitan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu ketergantungan yang tinggi pada utang luar negeri juga menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal di negara berkembang. Pembayaran hutang yang besar seringkali mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan ke belanja publik dalam sektor-sektor esensial seperti, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketergantungan pada hutang ini membuat negara berkembang rentan menghadapi fluktuasi nilai tukar dan suku bunga Global yang dapat

mempengaruhi kestabilan ekonomi dan fiskal hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Korupsi dan manajemen yang buruk dalam pengelolaan anggaran juga merupakan tantangan yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas di negara berkembang. Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program sosial dan pembangunan bisa menggunakan atau tidak dikelola dengan baik, efektivitas kebijakan fiskal menjadi terbatas yang mana ketidakstabilan politik sering kali mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal yang telah direncanakan menyebabkan perubahan kebijakan yang tiba-tiba yang merugikan sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu transparansi fiskal dan akuntabilitas sangat penting untuk memperbaiki pengelolaan kebijakan fiskal di negara berkembang.

Kebijakan fiskal juga seringkali tidak propor atau tidak memadai dalam mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan banyak negara berkembang lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek sementara masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial sering terabaikan sehingga kebijakan yang lebih inklusif untuk memperhatikan distribusi kekayaan yang adil sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat fiskal dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang berada di garis kemiskinan (Anwar, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan peran kebijakan fiskal secara mendalam serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia. Metode ini memungkinkan eksplorasi fenomena kompleks yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, termasuk berbagai aspek implementasi, tantangan, dan efektivitasnya di negara berkembang. Berdasarkan pendekatan kualitatif ini terdapat kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, literature yang relevan, dan jenis data berupa dokumen dalam sumber publikasi kemudian penulis mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan materi. Analisis yang dilakukan adalah dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder dari laporan pemerintah, jurnal akademik dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Berdasarkan konteks kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan yang mana program ini didanai melalui anggaran belanja negara yang merupakan wujud dari kebijakan fiskal yang pro kemiskinan.

Namun Tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan fiskal adalah distribusi yang tidak merata dan ketidaksesuaian antara target kebijakan dengan

implementasinya di lapangan meskipun ada banyak program bantuan sosial Tetapi masih terdapat banyak masyarakat yang belum terjangkau atau yang tidak mendapatkan manfaat maksimal. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya menambah jumlah program tetapi juga meningkatkan efektivitas distribusi bantuan dan aksesibilitas bagi mereka yang membutuhkan.

Perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal Indonesia yang mana pendidikan lebih baik terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka panjang sementara perbaikan di sektor kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban sosial. Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor ini namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan kualitas pelayanan yang merata di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu reformasi pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dimana peningkatan penerimaan pajak dapat memberikan lebih banyak dana untuk program sosial dan pembangunan (Hadi, 2021).

3.2 Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana pajak yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendanai program-program pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial contohnya penerapan pajak progresif di Indonesia dirancang untuk memastikan masyarakat dengan penghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap anggaran negara yang kemudian dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik. Selain insentif pajak untuk sektor tertentu seperti pengurangan pajak bagi UMKM dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun kebijakan pajak juga memiliki tantangan dalam implementasinya beban pajak yang tidak seimbang atau pengelolaan pajak yang kurang efektif dapat menyebabkan tekanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah contohnya pengenaan pajak barang tertentu dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat kecil sehingga Pemerintah perlu mengkombinasikan kebijakan pajak yang berkeadilan dengan mekanisme subsidi untuk melindungi kelompok rentan yang Hal ini penting agar kebijakan fiskal melalui pajak benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas (Prasetyo, 2021).

3.3 Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Dana desa merupakan salah satu inovasi kebijakan fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Alokasi Dana Desa digunakan untuk membangun infrastruktur, pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Implementasi program ini terbukti mampu mengurangi Angka kemiskinan di beberapa wilayah terutama di daerah-daerah tertinggal yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.

Meskipun demikian efektivitas Dana Desa masih menghadapi beberapa kendala seperti pengelolaan yang tidak transparan dan ukurannya kapasitas apa saja dalam perancang program yang tepat jalan yang mana Selain itu tantangan lain adalah potensi penyalahgunaan dana yang

dapat mengurangi dampak positifnya terhadap Kesejahteraan Sosial sehingga untuk meningkatkan efektivitasnya pemerintah dalam memperkenalkan sistem pengawasan berbasis digital dan pelatihan manajemen bagi perangkat desa melalui langkah-langkah ini diharapkan dana desa dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Nugraha, 2021).

3.4 ³¹ Pengelolaan Defisit Anggaran dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan

Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diperoleh biasanya digunakan untuk menandai program pembangunan dan pelayanan publik yang mana di Indonesia defisit anggaran sering kali digunakan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Meskipun dapat memberikan manfaat ekonomi defisit yang tidak dibawa dengan baik berpotensi meningkatkan beban hutang negara yang membatasi ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan defisit anggaran yang baik mencakup langkah-langkah seperti prioritas belanja negara, efisiensi pengelolaan dana dan optimalisasi penerimaan pajak yang mana defisien yang dibiayai melalui hutang luar negeri harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan efektif agar tidak membebani generasi mendatang ketika digunakan secara strategis defisit anggaran dapat mendorong investasi jangka panjang yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun jika divisi terus meningkat tanpa kontrol Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi dan menurunkan daya tahan ekonomi nasional (²² Rahman, 2022).

3.5 Peran Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Pandemi covid 19 memberikan tantangan besar bagi kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengeluaran publik terutama di sektor kesehatan dan perlindungan sosial di tengah menurunnya penerimaan negara akibat interaksi ekonomi. Kebijakan fiskal yang responsif seperti program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk melindungi masyarakat yang rentan mendorong pemilihan usaha kecil dan menengah serta memperkuat sistem kesehatan nasional.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah mencakup subsidi untuk kebutuhan dasar, insentif pajak untuk sektor terdampak dan peningkatan belanja kesehatan untuk mengandalkan vaksin dan efektivitas peralatan pasien meskipun kebijakan ini meningkatkan defisit anggaran efek positifnya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi justifikasi utama. Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat untuk mencegah inefisiensi dan korupsi dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengadopsi strategi sistem yang lebih berkelanjutan untuk memastikan pemilihan ekonomi yang inklusif dan merata (²³ masa depan (Prasetyo, 2021).

3.6 Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program ³⁷ pemulihan ekonomi nasional diluncurkan pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap dampak pandemi covid 19 yang ³⁸ melunakkan berbagai sektor ekonomi yang mana program ini berfokus pada tiga pilar utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan

bagi dunia usaha khususnya UMKM. Program ini mencakup pengadaan vaksin, subsidi listrik, bantuan sosial tunai serta insentif pajak untuk sektor terdampak. Implementasi dari program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dengan mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan usaha kecil yang terdampak pandemi.

Meski PEN menunjukkan dampak positif dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendukung daya beli masyarakat tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah efisiensi alokasi anggaran yang mana penyerapan anggaran yang lambat dan distribusi bantuan yang kurang merata menjadi hambatan dalam mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat transportasi dalam penyaluran bantuan dan koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan agar implementasi dari program ini dapat lebih efektif dalam mengatasi krisis (Prasetyo, 2021).

3.7 Tantangan dalam Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Pembangunan

Integrasi antara kebijakan fiskal dan Pembangunan merupakan tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia yang mana kebijakan fiskal akan berpusat pada pengelolaan defisit anggaran seringkali berbenturan dengan kebutuhan pembangunan yang memerlukan investasi besar di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Salah 1 tantangan utama adalah keterbatasan ruang fiskal akibat beban utama negara yang meningkat dan hal ini menyulitkan pemerintah untuk men²⁶okasikan anggaran yang cukup bagi Pembangunan Jangka panjang. Selain itu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penggunaan kebijakan fiskal juga menjadi kendala yang mana untuk tidak sesuai yang Prioritas pembangunan di tingkat nasional dan lokal seringkali menghambat efektivitas kebijakan dan hal ini perlu diatasi dimana Pemerintah perlu mengembangkan strategi fiskal yang berkelanjutan seperti optimalisasi penerimaan pajak dan efisiensi pengeluaran. Melalui pendekatan ini ke⁴ijakan fiskal dapat terintegrasi dengan tujuan pembangunan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Dewi, 2020).

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal memegang peran penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang yang mana melalui instrumen anggaran seperti alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial kebijakan fiskal mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan ruang fiskal dan tidak efisien dalam implementasi program dampak positif kebijakan ini telah terlihat dengan bentuk peningkatan akses lay⁴an publik dan pengurangan tingkat kemiskinan melalui pengelolaan yang baik dan transparan kebijakan fiskal dapat menjadi pilar utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3193-3204.

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203-214.
- Anwar, F. (2020). "Tantangan Kebijakan Fiskal di Negara Berkembang: Analisis Faktor-Faktor Penghambat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(3), 123-135.
- Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 68-78.
- Dewi, R. (2020). "Hambatan dalam Penyerapan Anggaran Program PEN." *Jurnal Keuangan Negara*, 12(3), 90-110
- Hadi, Y. (2021). "Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 17(1), 80-92.
- Meirizal, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2433-2445.
- Munawar, H. (2019). Dampak Subsidi pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 14(3), 281-294.
- Nugraha, B. (2021). "Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Desa*, 13(1), 45-60.
- Prasetyo, A. (2021). "Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 89-104.
- Prasetyo, A. (2021). "Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Krisis Pandemi." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 89-104.
- Prasetyo, A. (2021). "Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(2), 45-60.
- Rahman, T. (2022). "Defisit Anggaran dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 12(1), 56-70.
- Salim, A. (2021). "Peran Pajak Progresif dalam Pemerataan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 19(2), 103-119.
- Sandryan, K. M., et al. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Pendekatan VAR dan VECM. *Journal of Economic and Community Studies (JECS)*, 12(3), 45–62.
- Wibowo, Y. (2022). "Pemberdayaan UMKM untuk Pengurangan Kemiskinan: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Pembangunan UMKM*, 14(3), 88-99.
- Wulandari Manik, C., et al. (2024). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap konsumsi, investasi, dan ekspor di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax, and Production*, 8(2), 78–95.

PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	doug.pcm.max.jp Internet	92 words — 2%
2	www.researchgate.net Internet	76 words — 2%
3	www.studocu.com Internet	65 words — 1%
4	desyastridanindya.blog.uma.ac.id Internet	55 words — 1%
5	willyriawan.blogspot.com Internet	47 words — 1%
6	ejournal.iainmu.ac.id Internet	45 words — 1%
7	jurnaluniv45sby.ac.id Internet	33 words — 1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	30 words — 1%
9	repository.iain-samarinda.ac.id Internet	27 words — 1%

10	slideplayer.info Internet	25 words — 1%
11	repository.radenintan.ac.id Internet	20 words — < 1%
12	Fitri Mustika Sari, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, Arif Fadilla. "Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia", <i>Journal of Economics, Assets, and Evaluation</i> , 2024 Crossref	18 words — < 1%
13	kuninganmass.com Internet	17 words — < 1%
14	www.jojonomic.com Internet	17 words — < 1%
15	apbsrilanka.org Internet	12 words — < 1%
16	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	12 words — < 1%
17	ANISA FAHMI. "PENGARUH GOOD GOVERNANCE, BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, DAN PDRB PERKAPITA TERHADAP IPM", <i>JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK</i> , 2018 Crossref	11 words — < 1%
18	ejournal.stdiis.ac.id Internet	11 words — < 1%
19	id.scribd.com Internet	11 words — < 1%

20	jabar.bpk.go.id Internet	11 words — < 1%
21	skanaa.com Internet	11 words — < 1%
22	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet	11 words — < 1%
23	www.powtoon.com Internet	11 words — < 1%
24	zdocs.tips Internet	10 words — < 1%
25	123dok.com Internet	9 words — < 1%
26	eprints.undip.ac.id Internet	9 words — < 1%
27	tarbiyatulabna.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
28	Harlin Sabrinda Rasya, Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Crossref	8 words — < 1%
29	adarominerals.id Internet	8 words — < 1%
30	digilib.unila.ac.id Internet	8 words — < 1%

31	Internet	8 words — < 1%
32	es.scribd.com Internet	8 words — < 1%
33	fr.scribd.com Internet	8 words — < 1%
34	idoc.pub Internet	8 words — < 1%
35	issuu.com Internet	8 words — < 1%
36	jatim.bpk.go.id Internet	8 words — < 1%
37	journal.ipm2kpe.or.id Internet	8 words — < 1%
38	rantizi.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
39	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	8 words — < 1%
40	stopfitnah.com Internet	8 words — < 1%
41	tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
42	www.coursehero.com Internet	8 words — < 1%
43	www.indonesiapower.co.id	

44 www.jawapos.com
Internet

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF